

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sugiono (2016:58) kajian pustaka adalah sebagai berikut :

“Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap artikel, buku, penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik penelitian”.

Topik penelitian mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

2.1.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Indra Bastian (2010:191) Kejelasan Sasaran Anggaran adalah sebagai berikut:

“Kejelasan sasaran anggaran adalah suatu rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendanaan yang diharapkan untuk membiayai dalam waktu periode tertentu”.

Menurut Ahmad Rudi (2019:209) kejelasan Anggaran adalah sebagai berikut:

“Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan dari suatu rencana anggaran yang di tentukan secara jelas dan spesifik dan dapat dimengerti pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut dalam waktu periode tertentu.

2.1.1.2 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Widiya Restu (2017:18) indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
membuat secara terperinci spesifik, jelas dan dapat dipahami tujuan umum atau tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja
menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang dapat diukur. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan).
3. Standar
Standar menetapkan standar atau target yang dicapai. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.

4. Jangka waktu
menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan dan suatu anggaran memiliki jangka waktu tertentu dalam membiayai biaya yang dikeluarkan, seperti yang dijelaskan pada jenis anggaran. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.
5. Sasaran prioritas
Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.
6. Tingkat kesulitan
Menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi
Menetapkan kebutuhan koordinasi dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan kriteria kejelasan sasaran anggaran harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Agar setiap orang yang bertanggung jawab dapat memahami dalam tujuan pencapaian anggaran.

2.1.2 Akuntabilitas Publik

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2013:18) definisi Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban dari pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggung-jawabkan, melaporkan dan menyajikan serta mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*) dan secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban”.

Sedangkan menurut Muhammad Idris (2015:7) definisi Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban hukum untuk memberi jawaban atau mempertanggungjawabkan tindakan seorang pejabat Publik. Juga dapat dilihat pada kemampuan berkerja secara efisien, efektif, adil, tepat waktu, procedural dan sesuai harapan masyarakat atau standar pelayanan yang ada dengan prakarsa dan inisiatif”.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:385) definisi Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Definisi lain yakni menurut Mahmudi (2016:9) definisi Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat”.

Dari keempat definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan Pertanggung jawaban, melaporkan dan menyajikan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.1.2.2 Indikator Akuntabilitas Publik

Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut Mahmudi (2013:9) sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas Program**
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

2. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk melaporkan segala yang menjadi pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas publik memiliki tanggung jawab atas segala yang menjadi tanggung jawab.

2.1.3 KINERJA MANAJERIAL

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Manajerial

Menurut Mahmudi (2007:69) kinerja manajerial adalah sebagai berikut :

“Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hasil dari proses aktivitas manajerial sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan manajerial mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan”.

Sedangkan Menurut Krismiaji (2011:68) mendefinisikan bahwa kinerja manajerial adalah sebagai berikut:

“Manajer yang menghasilkan kinerja dengan mengerahkan bakat dan kemampuan, serta beberapa usaha orang lain yang berbeda di dalam daerah wewenangnya”.

Sedangkan menurut Shelly Febriana (2019:210) kinerja manajerial sebagai berikut:

“Kinerja manajerial adalah efektivitas kerja yang dilakukan oleh manajer yang merupakan hasil akhir dari rangkaian proses manajerial, meliputi

proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan”.

Sedangkan menurut Ahmad Mudhani (2018:133) Kinerja manajerial adalah sebagai berikut:

“Kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan”.

Dari keempat pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial meliputi proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi atau laporan pertanggungjawaban, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Manajerial

Menurut Mahoneyetal (1963) dalam Afriantoni (2019:88) Kinerja manajerial diukur melalui evaluasi diri dari dimensi kinerja. Keseluruhan pengukuran dikalkulasikan dengan membagi delapan sub dimensi dengan pengukuran untuk kinerja manajerial yaitu:

1. **Perencanaan**
Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. **Investigasi**
Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan,

- pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
3. **Koordinasi**
Pengkoordinasian merupakan proses menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
 4. **Evaluasi**
Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
 5. **Pengawasan**
Pengawasan adalah penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menagani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
 6. **Pemilihan Staff**
Memelihara kondisi kerja dari satu atau beberapa unit yang dipimpin, dengan mengidentifikasi kekuatan kerja, inventarisasi orang-orang yang ada dan merekrut tenaga kerja, melakukan wawancara pekerjaan, pemilihan karyawan, menempatkan, mempromosikan, menilai, merencanakan karir kompensasi dan pelatihan pengembangan calon atau pelaksana yang ada sehingga tugas-tugas dapat dicapai secara efektif dan efisien”.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja manajerial saling berkaitan satu sama lain.

2.1.3.3 Penilaian Kinerja Manajerial

Menurut Mulyadi (2001: 419) penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.

2.1.4 Satuan Kerja Perangkat daerah

Menurut Atep Adya (2005:22) Kepala satuan kerja perangkat daerah mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- e. Mengelola utang dan piutang.
- f. Menggunakan barang milik daerah.
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa satuan kerja perangkat daerah merupakan pengguna anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kepala satuan kerja perangkat daerah bertugas untuk menyusun, mengelola dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

Menurut Khusaini (2018:75) Dengan adanya anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi. Karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Menurut Baldrick Siregar et.al (2013:10) Kejelasan sasaran anggaran membantu pegawai agar dapat mencapai kinerja yang direncanakan. dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tersebut maka tingkat kinerja yang diharapkan akan dapat tercapai. Dan menurut Deddy (2006:49) Sebagai alat perencanaan, adanya tujuan anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

Dan menurut Suhartono & Solichin (2006) Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Locke (1968) dalam Larrisa anditha (2018) menyatakan bahwa mencantumkan kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*) secara spesifik adalah lebih produktif dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik dan akan mendorong karyawan melakukan yang terbaik. Kejelasan sasaran anggaran sangat penting untuk menghindari ambiguitas tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paulus Peka Hayon (2016) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. Selain itu Cecilia Lelly Kewo (2017) Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah daerah kabupaten-kota di Provinsi Sulawesi Utara. Dan dilakukan oleh Lusiana Kanji (2018) yang menyatakan bahwa Hasil ini juga menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Makassar.

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan pegawai untuk mengetahui tujuan anggaran secara spesifik hingga kinerja yang direncanakan tercapai karena terhindar dari ambiguitas.

2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial

Menurut Imbarudin (2019:108).Adanya akuntabilitas dapat mencegah pegawai atau lembaga pemerintah menyalah gunakan kekuasaannya. Dan akuntabilitas publik penting karena pegawai atau lembaga pemerintah dapat saja lalai menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan atau alpa menjalankan kewajibannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja atau dilaksanakan dengan setengah hati. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara optimal dan masyarakat tetap diperlakukan secara tidak adil

Menurut Mardiasmo. (2002:134). Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Dan menurut Sri Yuliani (2010:44) Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

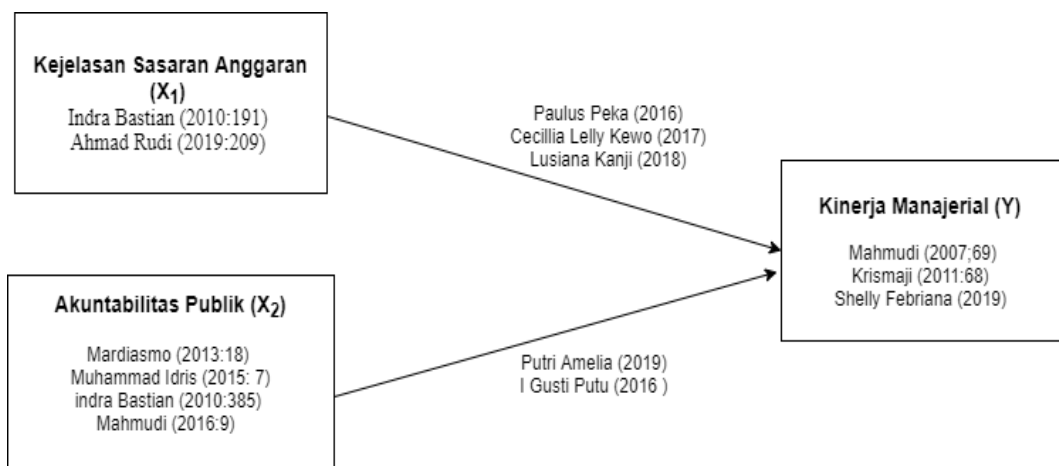
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putri Amelia (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dalam pengujian hipotesis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten Solok Selatan. Dan penelitian lain I Gusti Putu (2016) yang menyatakan

bahwa mendukung hipotesis H₂ yang menyatakan bahwa Akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial SKPD.

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial karna didalamnya terdapat prinsip pertanggung jawaban.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerka pemikiran diatas, maka dibuat gambar pardigma sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 HIPOTESIS

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2011:64). hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

“Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagai mana adanya”.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah penulis kemukakan pada kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

- H₁: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- H₂: Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Bandung Barat.